

6-30-1999

## STUDI SISTEM EKONOMI ISLAM SEBAGAI SISTEM EKONOMI ALTERNATIF (Telaah Kritis Terhadap Pola Kebijakan Ekonomi Orde Baru)

Nanang E. Ariadi

Dwi Sugiarto

Follow this and additional works at: <https://bulletin.bmeb-bi.org/bmeb>

---

### Recommended Citation

Ariadi, Nanang E. and Sugiarto, Dwi (1999) "STUDI SISTEM EKONOMI ISLAM SEBAGAI SISTEM EKONOMI ALTERNATIF (Telaah Kritis Terhadap Pola Kebijakan Ekonomi Orde Baru)," *Bulletin of Monetary Economics and Banking*: Vol. 2: No. 1, Article 5.

DOI: <https://doi.org/10.21098/bemp.v2i1.190>

Available at: <https://bulletin.bmeb-bi.org/bmeb/vol2/iss1/5>

This Article is brought to you for free and open access by Bulletin of Monetary Economics and Banking. It has been accepted for inclusion in Bulletin of Monetary Economics and Banking by an authorized editor of Bulletin of Monetary Economics and Banking. For more information, please contact [bmebjournal@gmail.com](mailto:bmebjournal@gmail.com).

## **STUDI SISTEM EKONOMI ISLAM SEBAGAI SISTEM EKONOMI ALTERNATIF**

**(Telaah Kritis Terhadap Pola Kebijakan Ekonomi Orde Baru)**

***Nanang E. Ariadi dan Dwi Sugiarto\*)***

*Krisis Ekonomi yang terjadi di Indonesia tidak terlepas dari pemilihan pola sistem dan strategi kebijakan ekonomi Orde Baru. Dibalik hasil-hasil spektakuler pembangunan ekonomi selama tiga dasawarsa, ternyata sistem ekonomi Orde Baru mewariskan banyak permasalahan dan kesenjangan di bidang sosial, ekonomi dan politik. Terlepas dari siapa yang harus bertanggungjawab atas terjadinya krisis, yang pasti pelaksanaan proses agenda reformasi ekonomi tidak bisa tidak untuk ditunda kembali. Kebijakan ekonomi dimasa Orde Baru yang lebih mengagungkan tingkat pertumbuhan dan stabilitas daripada pemerataan ternyata telah melahirkan satu bentuk kesenjangan yang luar biasa di berbagai sektor kehidupan.*

*Proses pembangunan telah membawa bias keatas, hanya pada sekelompok orang yang mendapat jatah dari kue pembangunan. Akumulasi dari berbagai permasalahan dan kesenjangan yang ada ialah keterpurukan ekonomi Indonesia dalam menghadapi badai krisis yang melanda. Lemahnya fundamental perekonomian nasional dikarenakan keterpasungan kreativitas ekonomi rakyat dan ketidakpercayaan rakyat terhadap kekuatan ekonominya memberikan inspirasi tentang perlunya memikirkan kembali konsep pembangunan ekonomi yang telah ada.*

*Konsep Sistem Ekonomi Islam adalah sebuah alternatif pemecahan dari permasalahan ekonomi yang melanda bangsa kita. Sebuah konsep sistem ekonomi yang menawarkan prinsip-prinsip egalitarian, keterbukaan, keadilan, demokrasi dan keseimbangan yang berdasar pada hubungan Tuhan-manusia dan alam dalam menjawab problematika ekonomi umat.*

---

\*) Nanang E. Ariadi dan Dwi Sugiarto: Mahasiswa Program Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Jember, Jember.

## I. Pendahuluan

### *Latar Belakang Penulisan*

**H**ampir dua tahun berjalan Indonesia mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan. Sejak pertengahan Juli 1997 hingga sekarang masih belum ada tanda krisis akan segera berakhir. Seperti telah diketahui umum bahwa krisis ini bermula dari krisis moneter regional kawasan Asia Tenggara, yakni saat pemerintah Thailand mendevalusi mata uang Bath pada tanggal 2 Juli 1997 terhadap Dolar US. Akibatnya nilai tukar Rupiah merosot tajam hingga pernah mencapai Rp15.000,00 per US\$ pada awal tahun 1998.

Terdepresiasinya nilai Rupiah kemudian menjalar dengan cepat menjadi krisis ekonomi secara keseluruhan di segala bidang, yang semula dirasakan terjadi pada sektor perbankan. Sehingga untuk menghadapi rentetan krisis ini pemerintah mencoba mengambil garis kebijakan mendasar yang terdiri atas empat tindakan, yakni stabilisasi moneter, pengetatan likuiditas, penghematan dan penyesuaian struktural melalui liberalisasi perdagangan dan intervensi (Saidi, 1998: 18).

Namun implikasi mendasar dari krisis ini terhadap perekonomian nasional adalah dipertanyakannya kembali thesis kebijakan perekonomian nasional yang selama ini dijalankan. Pandangan spekulatif internasional tentang Indonesia sebagai negara berkembang yang digadang-gadang sebagai *new emerging forces* dan anggota kelompok ekonomi Asia berkinerja tinggi (*high performing Asian economies*) dengan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata di atas 6-7% per tahun selama 25 tahun terakhir menjadi runtuh oleh krisis karena lemahnya fundamental dasar perekonomian. Disamping itu, yang menyebabkan semakin parahnya tingkat krisis adalah masalah sosial lain, seperti ketimpangan atau kesenjangan yang tidak mengalami perbaikan berarti pada jaman Orde Baru kalau tidak hendak dikatakan semakin memburuk.

Lebih lanjut Faisal Basri (1995: 91) menyebutkan paling tidak ada tiga macam ketimpangan yang kerap kali mengganjal suatu masyarakat atau bangsa dalam mencapai kesejahteraan yang bersendikan pada asas keadilan sosial. Yakni (1) kesenjangan antar daerah, (2) kesenjangan antar sektor, serta (3) kesenjangan distribusi pendapatan masyarakat.

Kesenjangan pertama lebih bersifat struktural dimana penanganan dan pemecahan masalah daerah masih bersifat sentralistik. Sehingga daerah kurang memiliki keleluasaan dan kelurwesan dalam menangani serta merumuskan strategi dan langkah-langkah dalam memecahkan permasalahannya sendiri. Sementara jenis kesenjangan yang disebutkan kedua lebih disebabkan oleh strategi pembangunan yang bias ke sektor perkotaan (*urban bias*) atau ke sektor moden sehingga sektor tradisional dan pembangunan daerah pedesaan relatif

tertinggal. Kesenjangan jenis yang ketiga, yakni kesenjangan distribusi pendapatan, dapat terlihat secara jelas meskipun data-data statistik yang ada menunjukkan perbaikan. Kesenjangan ini dapat dilihat dari semakin tingginya angka gini rasio sebagai tolok ukur distribusi pendapatan, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Data BPS (1994) menunjukkan bahwa sampai tahun 1994 angka gini rasio perkotaan lebih tinggi dari pedesaan, artinya kesenjangan distribusi pendapatan lebih dirasakan di perkotaan dibanding pedesaan (Kuncoro, 1996: 14). Adalah benar adanya jika dikatakan bahwa pendapatan rata-rata masyarakat secara agregatif (keseluruhan) mengalami peningkatan, namun ini tidak cukup menggembirakan jika diiringi oleh kesenjangan yang kian kentara, sebab hal tersebut merupakan benih-benih potensial bagi munculnya persoalan-persoalan sosial.

Dampak yang harus dibayar mahal oleh krisis ekonomi ini adalah runtuhnya kekuatan pemerintahan Orde Baru yang ditandai dengan mundurnya Bapak Soeharto sebagai Presiden RI dan digantikan oleh Presiden Habibie yang prioritas tugasnya memulihkan kondisi perekonomian nasional menjadi lebih stabil. Berbagai kesenjangan yang ada harus menjadi agenda yang urgen dan signifikan untuk mendapat prioritas utama pemulihan stabilitas ekonomi nasional disamping agenda nasional lainnya, seperti politik.

Berkepanjangannya krisis ekonomi ini menunjukkan bahwa selama ini ada sesuatu yang salah (*there is something wrong*) dalam proses pembangunan nasional. Strategi dan sistem pembangunan nasional yang lebih rnengutamakan pertumbuhan tinggi dengan topangan luar negeri ternyata tidak cukup efektif dan kuat menahan gelombang eksternal shock yang ada. Kebijakan *trickle down effect* tidak bisa membuktikan bahwa pemerataan itu berasal dari atas (top down), padahal pada hakekatnya pembangunan berarti pertumbuhan dan pemerataan adalah suatu proses perubahan dan, oleh dan untuk masyarakat itu sendiri (Ismail Saleh, 1990: xxv). Reformasi ekonomi menjadi suatu keharusan dalam merokonstruksi infra dan supra struktur makro ekonomi sebagai upaya keluar dan kemelut krisis. Berdasar kondisi peperti ini perlu adanya suatu pemikiran dan telaah kritis tentang reformulasi sistem kebijakan pembangunan ekonomi nasional yang komprehensif, demokratis dan bervisi kerakyatan yang tentunya harus ditunjang oleh *political will* dan kondisi pemerintahan yang bersih.

### ***Perumusan Masalah***

Secara makro, banyak keberhasilan yang mampu dicapai oleh pemerintahan Orde Baru di bidang perekonomian yang terkenal dengan konsep Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA). Namnn, kebijakan pembangunan yang bertumpu pada trilogi pembangunan yaitu stabilitas nasional, pertumbuhan dan pemerataan, dimana lebih mementingkan dan menerapkan stabilitas dan pertumbuhan daripada pemerataan, telah membawa bias ke atas. Maksudnya hanya sekelompok orang yang mendapat bagian terbesar

dari jatah kue pembangunan. Selama ini pemerataan kesejahteraan lebih dilihat sebagai suatu hal yang sifatnya pragmatis, yakni sebagai pembagian hasil atau kelebihan (surplus) pembangunan. Sehingga yang menjadi orientasi utama adalah tingkat pertumbuhan dan surplus pembangunan yang tinggi.

Sebagai akibat dari kondisi tersebut, maka terjadilah kesenjangan yang sangat kentara yang dapat dilihat dan diukur dalam bidang ekonomi. Walaupun pembangunan terus dilakukan, namun jurang pemisah antara si miskin dan si kaya makin lebar saja. Lebih jauh lagi, data BPS (1992) menunjukkan bahwa usaha kecil di Indonesia berjumlah 33,4 juta yang tersebar di berbagai sektor. Jumlah yang terbanyak adalah sektor pertanian (63,8%), perdagangan (17,4%), industri pengolahan (7,5%), jasa (4,8%), angkutan (3,6%), bangunan konstruksi (2,6%) serta keuangan dan asuransi (0,6%). Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengusaha kecil masih berada di sektor yang secara ekonomi termasuk sektor yang kurang menguntungkan, yaitu sektor pertanian.

Krisis ekonomi mengakibatkan sektor moneter mengalami keterpurukan hingga menimbulkan kemacetan luar biasa pada sektor riil atau produksi. Implikasi terberat secara logika tentunya dialami oleh pengusaha kecil yang bergerak dalam sektor tersebut. Hal ini dikarenakan tingginya tingkat suku bunga pinjaman yang belum tentu bisa dicapai oleh pengusaha-pengusaha dengan omzet kecil sementara tanpa bantuan kredit sulit bagi mereka untuk dapat bergerak dan beroperasi secara leluasa. Dari realitas seperti ini sangat relevan apabila diambil satu permasalahan mendasar tentang formulasi sistem ekonomi yang tepat dan sesuai untuk Indonesia dengan tetap memberdayakan potensi ekonomi rakyat dalam menguasai sumber daya?

### ***Tujuan dan Manfaat Penulisan***

Dengan melihat realita yang sekarang tengah terjadi, penulisan ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pola kebijakan sistem ekonomi Orde Baru.
2. Memberikan deskripsi sistem ekonomi Islam sebagai sistem ekonomi alternatif.
3. Untuk mensosialisasikan sistem ekonomi Islam sebagai solusi alternatif sistem ekonomi yang sesuai bagi Indonesia dengan tetap memberdayakan potensi ekonomi rakyat sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

Sementara manfaat yang diharapkan penulis dari karyatulis ini adalah :

1. Sebagai bahan masukan dan kajian bagi pemerintah atau instansi yang berwenang untuk mengkaji atau memikirkan ulang konsep pembangunan ekonomi yang selama ini diterapkan.
2. Sebagai bahan infomiatif bagi penulis ataiu peneliti lain yang *concern* terhadap masalah yang sama dengan penulisan ini.

3. Sebagai wacana yang terbuka untuk di diskusikan dalam memformulasikan sistem ekonomi yang sesuai dengan struktur perekonomian masyarakat Indonesia.

## **II. Tinjauan Pustaka**

Per definisi segala sesuatu yang menyangkut banyak bagian/unsur yang saling berinteraksi adalah sistem (Mubyarto, 1987: 213). Sistem ekonomi adalah sistem yang memiliki unsur-unsur yang terlibat dalam proses produksi dan konsumsi dan memerlukan aturan dalam interaksi tertentu, seperti sumber daya alam, teknologi dan manusia serta subsistem sosial ekonomi dan lembaga-lembaga masyarakat yang terlibat didalamnya. Karena tiap negara mempunyai sistem nilai tertentu yang berbeda dengan negara lain, maka sistem ekonomi setiap negara memiliki ciri khas tersendiri. (Mubyarto, 1987: 214).

Krisis ekonomi diakibatkan krisis moneter regional secara langsung dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Kekeliruan dalam memilih kebijakan sistem ekonomi nasional dengan tidak terlalu berpihak pada rakyat membuat fundamen perekonomian nasional menjadi rapuh dan tidak stabil. Dari argumen ini memberikan simpulan tentang perlunya review dan rethinking atas pola kebijakan pembangunan ekonomi yang selama ini dilakukan. Namun yang tidak boleh dinafikkan adalah hasil-hasil positif dari pembangunan ekonomi yang selama ini dilakukan.

### ***Hasil Pembangunan Ekonomi Orde Baru***

Hasil-hasil pembangunan yang dilakukan selama pemerintahan Orde Baru menunjukkan grafik peningkatan taraf hidup rakyat yang luar biasa. Hal ini bisa dilihat dari angka statistik hasil pembangunan ekonomi Orde Baru selama kurun waktu 25 tahun terakhir, yakni (GBHN, 1983) :

1. Jumlah penduduk miskin yang pada tahun 1970 berjumlah 70 juta pada tahun 1993 tinggal 25,9 juta.
2. Pendapatan rata-rata per jiwa pada tahun 1970 sekitar US\$ 70 dan menjelang akhir PJP I menjadi US\$ 700.
3. Laju pertumbuhan produksi nasional dengan harga konstan selama 25 tahun terakhir rata-rata tumbuh + 6,0 % setiap tahun, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,8 % setiap tahun.
4. Sektor industri berkembang rata-rata 12,0 % per tahun, meningkat dari 9,2 % pada tahun 1969 menjadi 21,3 % pada tahun 1991.
5. Kegiatan ekspor non migas meningkat dari US\$ 569 juta pada 1968 menjadi US\$28,9 milyar pada akhir PJP I.

6. Secara kumulatif, nilai investasi asing (PMA) meningkat menjadi US\$37 miliar, sedangkan PMDN menjadi US\$ 159,4 triliun (1988-1990).
7. Tabungan pemerintah pada akhir PJP I adalah Rp. 15,7 triliun.

Sedangkan untuk memacu jalannya proses pembangunan, pemerintah telah melaksanakan deregulasi dan debirokratisasi secara bertahap (GBHN, 1993). Maksudnya untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan memberikan dorongan dan kemudahan kepada dunia usaha, terutama di sektor keuangan/moneter dan sektor riil. Di sisi lain kepercayaan dunia internasional juga semakin tinggi ditandai dengan meningkatnya nilai pinjaman dan bantuan yang diterima.

**Tabel 2.1**  
**Bantuan Pembangunan Internasional Komitmen oleh IGGI/CGI**

Tahun Fiskal	Dalam juta US\$
1998/1990	4,297
1990/1991	4,516
1991/1992	4,755
1992/1993	4,949
1993/1994	5,112
1994/1995	5,203
1995/1996	5,360
1996/1997	5,260

Sumber : *Resources Book Indonesia* 1996 (catatan: sumber asli Bank Indonesia)

Sebagai negara berkembang yang sedang menuju pada negara industri baru secara empirik memang banyak hal yang diraih, namun secara khusus ternyata menyimpan banyak sisi negatif. Kebijakan protektif yang dirumuskan dalam beraneka bentuk subsidi telah menghasilkan industri yang tidak efisien. Model pembangunan ekonomi yang terlalu berorientasi atau terintegrasi ke dunia internasional telah membuat ketergantungan kita pada pinjaman luar menjadi begitu besar, sehingga defisit transaksi berjalan semakin besar.

Akibat lain dari kebijakan protektif adalah suburnya praktik ekonomi patron-klientelistik. Hal ini mengakibatkan fondasi ekonomi makro menjadi rapuh dan tidak stabil karena model pembangunan yang hanya mengandalkan sejumlah kecil masyarakat (pola konglomerasi). Dari luar mungkin terlihat stabil, tetapi hal itu tak ubahnya seperti api dalam sekam, yang dampaknya baru dirasakan ketika kita sedang menghadapi krisis ekonomi. Model pembangunan elitis bukan saja tidak adil, namun juga keropos karena kurang adil dan meratanya kue pembangunan. Dan sisi negatif yang paling bisa dirasakan pada masa

krisis dan reformasi ini adalah model pembangunan yang selama ini berada dalam sistem politik otoritarian, dan kekuasaan yang terlalu lama telah menghasilkan sistem yang penuh dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Kondisi demikian merupakan implikasi dari sistem politik yang tanpa pengawasan, dan hubungan klientilistik yang terlalu kuat.

### ***Pertumbuhan versus pemerataan***

Seperti yang telah dibahas pada bagian awal bahwa model pembangunan yang elitis dan protektif ternyata menyimpan sejumlah masalah besar dalam segi sosial ekonomi. Krisis yang terjadi akibat kurang tercapainya perasaan keadilan, baik keadilan sosial maupun ekonomi. Sehingga relevan bila difikirkan kembali, apakah masalah keadilan ekonomi dan/ atau keadilan sosial lebih banyak menjadi masalah pada saat kemajuan kemakmuran, atautkah pada saat kemunduran dan keprihatinan seperti saat ini. Meskipun permasalahan yang sering diperdebatkan adalah masalah pertumbuhan (*growth*) dan pemerataan (*equity*), namun berkaca pada masa orde baru tampak jelas bahwa para arsitek ekonomi Orde Baru lebih berminat untuk membahas masalah pertumbuhan dibanding masalah pemerataan. Sistem ekonomi Orde Baru terlalu mempercayai bahwa kemajuan ekonomi secara ekonomis akan menghasilkan keadilan ekonomi (*trickle down effect*), seperti persaingan tidak saja mempercepat pertumbuhan tetapi juga akan membagi hasil pertumbuhan secara merata (Mubyarto, 1987: 211). namun pada kenyataannya kemajuan otomatis semacam ini jarang sekali terjadi, justru mengakibatkan jurang kesenjangan sosial semakin lebar.

Pada dasarnya terdapat tiga tipologi pembangunan pertumbuhan seperti yang dikemukakan oleh Gary Field (dalam Todaro, 1995: 147), yakni 1) tipologi pertumbuhan perluasan sektor-modern, dimana pengembangan ekonomi dua sektor, tradisional dan industri modern tertumpu pada pembinaan dan pemekaran sektor modern. Pada tipologi ini sulit diperoleh ketagasan tentang perubahan atas ketimpangan distribusi pendapatan, karena distribusi pendapatan bersifat fluktuatif, bisa dikatakan membaik namun bisa dikatakan memburuk. 2) Tipologi pertumbuhan yang memperkaya sektor modern. Pada tipologi ini pertumbuhan ekonomi memang berjalan pesat namun distribusi pendapatan semakin timpang, karena hasil pembangunan hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang. 3) Tipologi pertumbuhan yang memperkaya sektor tradisional. Dalam tipologi pertumbuhan ini hampir semua manfaat dapat lebih dirasakan secara merata oleh segenap elemen masyarakat, terutama yang bergerak di sektor tradisional, dan sedikit saja yang menetes di sektor industri modern. Buah dari tipologi ini pendapatan meningkat dan menyebar lebih merata sehingga berhasil mengurangi angka kemiskinan. Pada tipologi ini peran masyarakat dalam menentukan arah perekonomian sangat besar karena adanya dukungan pemerintah pada sektor ekonomi rakyat.

Pertumbuhan biasanya berkaitan dengan modernisasi, yakni adanya peranan teknologi tinggi dan alat ekonomi yang padat modal, sehingga hasil yang diharapkan memiliki keunggulan kompetitif dan dapat diekspor. Implikasi selanjutnya yang diharapkan adalah meningkatnya tingkat pendapatan nasional (GNP). Padahal GNP merupakan indeks kesejahteraan dan pembangunan nasional yang tidak tepat (Todaro, 1995: 168). Sehingga seringkali terjadi pertentangan dalam perumusan kebijakan pembangunan, antara penekanan prioritas pada pertumbuhan ataukah pada pemerataan.

Prioritas pertumbuhan memang berhasil meningkatkan tingkat pendapatan nasional (GNP), karena pertumbuhan biasanya berkaitan dengan modernisasi. Berarti penekanan pada peranan teknologi tinggi dan alat yang padat modal. Namun disadari bahwa tingginya GNP tidak menggambarkan kenaikan pendapatan penduduk secara agregat, sementara pembangunan ekonomi yang memperbesar pertumbuhan dulu baru membagikannya ternyata tidak bisa menutupi jurang sosial antara si kaya dan si miskin. Sedangkan prioritas pada pemerataan membawa konsekuensi pengorbanan bagi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, meskipun tidak bisa dikatakan angka pertumbuhan itu stagnan.

Kebijakan pembangunan yang mengarah pada pertumbuhan dan pemerataan memerlukan suasana yang stabil, karena stabilitas adalah syarat pokok bagi usaha pembangunan yang kontinyu. Stabilitas yang dinamis harus merupakan hasil dari pola pembangunan yang seimbang. Artinya, pembangunan yang senantiasa memelihara keseimbangan antara peningkatan produksi dengan laju yang cukup tinggi, dan pola pembagian hasil secara lebih merata (Prayitno dan Santosa, 1996:86). Karena dari dua aspek pertumbuhan dan pemerataan ini masing-masing memberikan andil besar bagi terselenggaranya kondisi stabilitas nasional yang mantap dan dinamis.

Sehingga untuk merealisasikannya diperlukan suatu pola kebijakan ekonomi yang dikembangkan oleh pemerintah dalam menanggulangi ketidakmerataan, sambil tetap mempertahankan dan atau meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut Todaro (1995: 175-179) menyebutkan ada empat kebijakan yang bisa menjadi pilihan kebijakan pemerintah yang menyangkut empat unsur penting, yaitu: 1) Distribusi fungsional, berarti terdapatnya upaya perubahan atas distribusi pendapatan fungsional melalui pola kebijakan untuk mengubah harga-harga faktor secara positif. Dari perubahan distribusi fungsional terdapat suatu pendekatan terhadap ekonomi tradisional. 2) Distribusi ukuran, berarti mengubah distribusi pendapatan melalui redistribusi progresif pemilikan harta (asset). Dengan demikian, garis kebijakan kedua adalah secara langsung mengurangi terpusatnya penguasaan harta, pendistribusian kekuasaan yang tidak merata, dan juga memperluas pendidikan serta kesempatan untuk memperoleh penghasilan. 3) pengurangan pendapatan golongan atas melalui pajak secara proporsional terhadap pendapatan dan kekayaan pribadi. Hal ini berarti adanya perubahan distribusi pendapatan golongan atas melalui

pajak pendapatan dan kekayaan yang progresif. 4) Peningkatan distribusi pendapatan golongan bawah melalui pengeluaran pemerintah dari pajak yang diterima, baik secara langsung maupun tidak langsung, maksudnya ada perubahan dalam distribusi pendapatan golongan lemah melalui pembayaran tunjangan dan penyediaan barang dan jasa pemerintah.

Kesimpulan dari kebijakan yang ditawarkan oleh Todaro (1995) ini adalah adanya suatu paket kebijakan ekonomi yang meliputi kebijakan untuk mengoreksi distorsi harga faktor produksi, kebijakam untuk merubah struktur distribusi kekayaan, kekuasaan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang disertai dengan kesempatan memperoleh penghasilan (pekerjaan), serta kebijakan yang dibuat untuk memodifikasi distribusi pendapatan melalui pajak progresif.

### ***Alternatif Pemecahan Masalah***

Dari beberapa sistem kebijakan yang selama ini diterapkan oleh rejim Orde Baru tampak adanya beberapa kelemahan, baik sistem liberalnya para teknokrat maupun sistem protektif milik kaum nasionalis-patrimonialis. Strategi pembangunan ekonomi yang ada memang membawa hasil-hasil prestisius selama kurun waktu tiga dasawarsa terakhir. Bila ditinjau secara empirik, pembangunan ekonomi Indonesia sejak Pelita I hingga PJP II, dapat dikatakan telah mengalami suatu proses pembangunan ekonomi yang cukup spektakuler. Pada tingkat makro, secara agregat keberhasilan pembangunan ekonomi bisa dilihat dan diukur dengan memakai banyak indikator, dua diantaranya yang umum dipakai adalah tingkat pendapatan nasional perkapita (GNP) dan laju pertumbuhan output agregat (PDB) rata-rata per tahun (Sasono, et.al, 1998: 14). Meski tingginya GNP tidak dapat dijadikan patokan kesejahteraan dan keberhasilan pembangunan nasional secara tepat.

Krisis ekonomi memberikan banyak pelajaran bagi kita bahwa reformasi ekonomi adalah jawaban untuk segera keluar dari krisis. Reformasi ekonomi memberikan dasar bagi kita untuk secara radikal memeriksa kembali strategi perekonomian nasional dan dicarinya alternatif sistem ekonomi baru dan cara untuk melaksanakannya, baik dari segi waktu, ruang lingkup dan muatan. Waktu disini merujuk pada saat kapan mulainya reformasi sistem yang ada itu dimulai dan dilakukan, segera ataukah ditunda. Ruang lingkup disini menurut Nelson (1990) lebih merujuk pada luasnya alternatif pemecahan yang direncanakan apakah berlangsung secara koheren atau sepotong-potong, sedangkan muatan merujuk pada jenis tindakan reformasi sistem yang dipilih, ortodoks atau heterodoks. Dari berbagai kelemahan yang didapat dari dua sistem yang pernah diterapkan diperlukan suatu gagasan tentang sistem ekonomi baru dan strateginya baik jangka pendek atau jangka panjang.

Sebagai negara yang berpenduduk mayoritas Islam (muslim), adalah wajar dan logis apabila kaum muslim memiliki kepentingan ekonomi yang lebih besar. Hal ini bukan berarti hendak menimbulkan spekulasi sentimen SARA, namun dari krisis ekonomi yang terjadi

maka yang menjadi korban terbesar adalah kaum muslim. Angka kemiskinan yang terbesar tentunya disandang oleh kaum muslim. Sehingga sistem ekonomi alternatif yang dapat dijadikan solusi untuk mengembalikan dan selanjutnya memperkuat perekonomian nasional adalah sistem ekonomi yang berbasis syariah (Sistem Ekonomi Islam). Sistem ekonomi Islam yang dimaksud adalah sistem ekonomi yang terjadi setelah prinsip ekonomi yang menjadi pedoman kerjanya dipengaruhi atau dibatasi oleh ajaran-ajaran Islam (Prawiranegara, Tanpa Tahun: 10-15).

Apalagi ditengah kontroversi mengenai pertumbuhan dan pemerataan di masa krisis seperti ini maka strategi baru yang lebih realistis dan berjangka panjang untuk meningkatkan kepercayaan ekonomi rakyat sebagai fundamen ekonomi nasional disamping tujuan untuk lebih pemeratakan distribusi pendapatan dengan tetap memikirkan cara bagaimana untuk segera lepas dari krisis. Sementara sistem ekonomi Islam sendiri adalah sistem yang dinamik dan terus berkembang untuk didialogkan dan dicari formula strategiknya sebagai sistem ekonomi nasional. Seperti yang dikatakan oleh Dawam Raharjo (1989: 86) bahwa sistem ekonomi Islam bukan suatu pemikiran yang bersifat final, melainkan terus berkembang melalui kerja ijtihad. Sistem ekonomi Islam bukan suatu hal yang hanya bersifat teoritis, namun merupakan hasil suatu proses transformasi nilai-nilai Islam yang membentuk kerangka serta perangkat kelembangaan dan pranata ekonomi yang hidup dan berproses dalam kehidupan masyarakat.

Seperti yang diketahui bahwa salah satu penyebab semakin parahnya krisis ini adalah tumbuh subur nya praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) semasa Orde Baru. Perilaku ini terjadi dikarenakan kurang transparannya berbagai kebijakan ekonomi serta model-model pembangunan ekonomi Orde Baru yang cenderung klientilistik, otoriter dan tidak demokratis, sedangkan sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang menganut prinsip-prinsip egalitarian, transparan, jujur dan bersih dari unsur-unsur tersebut. Penjelasan dan pembahasan mengenai sistem ekonomi Islam sendiri akan dibahas lebih lanjut dalam bab pembahasan.

### **III. Metode Penelitian**

Agar pembahasan yang diajukan tidak meluas dan untuk memudahkan analisa, maka perlu adanya pembatasan permasalahan. Bahwa permasalahan akan lebih difokuskan pada persoalan pola sistem ekonomi yang pernah dilaksanakan pada masa pemerintahan Orde Baru dan sistem ekonomi Islam sebagai sistem ekonomi alternatif.

#### ***Desain Penelitian***

Metode penelitian yang dipergunakan penulis dalam menyusun penulisan ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam

meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas pada masa sekarang (Nazir, 1988:63). dengan metode deskriptif ini penulis mencoba membuat satu deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena-fenomena yang terjadi pada sistem ekonomi yang dijalankan selama pemerintahan Orde Baru dan mendeskripsikan kemungkinan dan peluang diterapkannya sistem skonomi Islam sebagai sistem ekonomi alternatif.

Pola pendekatan yang dilakukan dalam memecahkan permasalahan yakni dengan menggunakan desain deskriptif-analitis. Melalui pendekatan studi deskriptif-analisis ini penulis berkehendak memberikan satu gambaran tentang fenomena-fenomena yang terdapat di seputar fokus permasalahan dengan diikuti satu analisa-analisa dengan tujuan untuk menguji hipotesa-hipotesa yang ada dan mengadakan interpretasi yang lebih dalam tentang hubungan-hubungan dari fenomena yang terjadi (Nazir, 1988:105)

### ***Metode Pengumpulan Data***

#### ***Metode Focus Discussing Group (FGD)***

Metode Focus Discussing Group (FGD) adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan diskusi-diskusi kelompok guna mencari berbagai informasi yang terkait dengan topik penulisan.

#### ***Metode Studi Literatur/Kepustakaan***

Metode studi kepustakaan adlah metode pengumpulan data dengan melihat, membaca dan menulis data-data dari literatur yang berkaitan dengan topik penulisan.

### ***Metode Analisa Data***

Proses dalam menganalisa data dilakukan penulis dengan menggunakan teknik diskusi-diskusi kelompok atau kajian kepustakaan terhadap informasi yang diperoleh baik dari kepustakaan, media cetak maupun elektronik. Informasi yang berkaitan dengan topik penulisan selanjutnya dikaji secara komprehensif. Melalui cara seperti ini dimunculkan satu bentuk kritikan ataupun saran yang bersifat umum terhadap inti permasalahan yang dianalisa. Dari saran dan kritik tersebut, akhirnya dapat diberikan suatu tawaran alternatif pemecahan dan sekaligus ditarik kesimpulan.

### ***Sumber Data***

Penyusunan karya tulis ilmiah ini sepenuhnya mengambil data yang bersifat sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang bersifat tidak langsung baik berupa dokumen-dokumen maupun informasi lain.

#### IV. Pembahasan

##### ***Deskripsi Kebijakan Ekonomi Orde Baru***

Berdasar pasal 33 UUD 1945, GBHN menggariskan bahwa pembangunan di bidang ekonomi didasarkan pada demokrasi ekonomi dan karena itu masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. Pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha. Sebaliknya, dunia usaha perlu memberikan tanggapan yang positif melalui kegiatan yang nyata sesuai dengan usahanya. Sehingga dari keduanya ada peran-peran ekonomi yang bersifat mutualistik dan saling mendukung.

##### ***1. Kebijakan Sistem Ekonomi Liberal***

Hasil-hasil pembangunan nasional selama PJP I yang terangkum dalam penjelasan GBHN 1993 tidak lepas dari pola kebijakan perekonomian yang selama ini dijalankan. Pemerintah Orde Baru pada awalnya jelas mewarisi masalah-masalah ekonomi yang berat yang ditinggalkan oleh era ekonomi terpimpin Orde Lama (1959-1965), dimana kebijakan lama adalah konfrontasi dan bermusuhan dengan investasi asing. Oleh karena itu, tindakan pertama yang segera dilakukan Orde Baru adalah program rehabilitasi dan stabilisasi sesuai dengan kebutuhan untuk mengembalikan kepercayaan asing. Secara pragmatis pemerintah Orde Baru memilih jalan keluar berupa kebijakan yang berorientasi ke luar (program liberalisasi) karena keperluan dukungan moral asing yang kemudian dilanjutkan dengan tindakan penghematan dan pengetatan kebijakan moneter. Dapat dikatakan bahwa sumber kekuatan awal Orde Baru dalam program stabilisasi ekonomi adalah bantuan/pinjaman asing.

Program stabilisasi Orde Baru yang diarsiteki kaum ekonom-teknokrat bisa dikatakan berhasil, terbukti turunnya inflasi ke tingkat 85 % pada 1968, dari hampir 1000% pada 1965. Kendati terdapat dampak negatif dari tindakan penghematan dan langkah-langkah stabilisasi itu, keadaan ekonomi cenderung normal. Selanjutnya strategi-strategi program teknokratis dikembangkan dan dilaksanakan melalui Program Repelita di bawah panduan naskah GBHN yang ditetapkan MPR tiap lima tahun sekali. Karena menganut sistem liberal dan melalui mekanisme pasar maka dalam melaksanakan strateginya, para ekonom di dukung oleh sejumlah besar pinjaman lunak (*soft loans*) dan hibah-hibah dari luar negeri, misalnya dari IGGI yang tentu saja dengan syarat pinjaman pada tingkat yang wajar, baik dalam hal suku bunga, jangka waktu pinjaman maupun periode pengembaliannya.

Prinsip umum yang dipakai oleh para teknokrat sejak tahap stabilisasi adalah diterapkannya sistem anggaran berimbang yang berbeda, dimana dua sumber eksternal pendapatan (migas dan bantuan asing) dimasukkan di dalamnya (Saidi, 1998:76). Dengan perkataan lain, anggaran dikatakan berimbang karena defisit yang terjadi di bayar oleh

pinjaman luar negeri. Implikasinya defisit transaksi berjalan yang semakin besar. Karena demikian strukturnya, sistem anggaran ini memiliki pengaruh luar biasa terhadap perekonomian dalam negeri sekaligus dapat mencerminkan akibat yang timbul jika ada guncangan dari luar.

Dinaikkannya tingkat suku bunga bank menjadi 6-9% sebulan dan tingkat penalti untuk kredit yang menunggak, sebagai bagian dari tahap stabilisasi memberikan sejumlah masalah yang terjadi pada awal 1970-an. Diantaranya banyak industri kecil dan menengah kolaps dan gulung tikar, karena besarnya beban bunga yang harus ditanggung, disusul pengangguran dan gangguan-gangguan sosial di perkotaan ditambah dengan persoalan etnis Cina, warisan Orde Lama yang belum terselesaikan secara tuntas, yang semakin lama semakin memburuk. Masalah ini berpuncak pada meletusnya peristiwa Malari 1974 dimana gerakan anti investasi asing meluap sedemikian besar. Permasalahan ini merupakan mata rantai dari implikasi kebijakan liberal yang berorientasi keluar yang selanjutnya memaksa pemerintah mengubah strategi pembangunannya.

## *2. Kebijakan sistem ekonomi nasionalis*

Selama satu dekade berikutnya, yaitu periode 1973-1983, strategi pembangunan berbalik arah sebagai akibat logis diterapkannya industrialisasi substitusi impor (Import Substitution Industrialize atau ISI). Hal ini ditandai dengan adanya tiga ciri kebijakan pemerintah, yakni *pertama* pengaturan penanaman modal asing yang makin restriktif. *Kedua*, kebijakan industri dan perdagangan yang lebih proteksionis dan *ketiga* strategi kebijakan pada umumnya pada umumnya bertambah intervensionistik. Dari tiga ciri ini jelas terlihat adanya perubahan dari pola liberal ke arah pola nasionalisasi yang semakin diperkuat oleh topangan boom minyak pada tahun 1970-an.

Orientasi ke dalam yang diterapkan sebagai pengganti orientasi liberal ditindaklanjuti dengan dibentuknya Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional, sebagai dampak dari peristiwa Malari 1974. Kebijakan sistem ekonomi nasionalis yang diberlakukan oleh para supra kabinet ini diantaranya (Kuntjoro-Jakti (1981) dalam Zaim Saidi, 1998: 78) adalah *pertama*, kebijakan investasi asing menjadi jauh semakin restriktif dan harus dalam bentuk *joint venture* serta penyertaan nasional harus ditingkatkan. Disamping itu, daftar sektor-sektor yang tertutup bagi investasi asing diperpanjang, insentif pajak dikurangi dengan jumlah tenaga kerja asing dibatasi. Bukti yang nampak adalah semakin besarnya penyertaan modal pemerintah, dari US\$ 263 juta pada tahun 1975 menjadi US\$ 595 juta pada 1983. *Kedua*, pemerintah meluncurkan sejumlah program kredit bagi pengusaha pribumi yang didanai melalui APBN. *Ketiga*, pemerintah menerapkan tindakan-tindakan protektif terhadap sektor industri kecil melalui Proyek Bimbingan dan Pengembangan Industri Kecil (BPIK).

Dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan pada masa tersebut jelas terlihat bahwa tonggak penting dari adanya *boom* minyak adalah bangkitnya kaum nasionalis dan patrimonialis. Dimana kendali negara (pemerintah) sangat dominan terhadap sistem ekonomi Indonesia, menggantikan sistem berbasis pasar yang didukung oleh kaum teknokrat pada masa sebelumnya. Dari sini terjadi pertentangan antara sistem ekonomi liberal berbasis pasar dengan sistem ekonomi nasionalistis.

Keunggulan komparatif berbasis pasar yang diajukan oleh kaum teknokrat dianggap tidak menjanjikan banyak kecuali ditpang oleh pertumbuhan ekonomi tinggi dalam tempo sekejap melalui integrasi dengan pasar internasional. Sementara keunggulan kompetitif yang diajukan kelompok nasionalis (merkantilistik) dapat dicapai melalui transformasi industri berbasis teknologi tinggi (*hitech*) dan padatmodal sehingga bentuk-bentuk proteksi dan fasilitas dari pemerintah sangat dibutuhkan. Hal ini secara sekilas mirip dengan keunggulan kompetitifnya Michael Porter (1990), dimana keunggulan kompetitif tidak didasarkan atas karunia alam tetapi harus diciptakan. Namun ada sedikit perbedaan dimana menurut Porter peran negara adalah terbatas untuk menciptakan iklim dan lingkungan yang kondusif, sedangkan kelompok merkantilistik (nasionalis) memandang bahwa pelaku utama haruslah negara. Berbagai program pembangunan yang bersifat protektif dan fasilitatif di satu sisi memberikan perlindungan bagi perekonomian nasional, tapi di sisi lain memunculkan efek negatif, seperti rasa kecemburuan bagi pelaku-pelaku ekonomi yang tidak memperoleh perlakuan protektif, munculnya monopoli atas sumber ekonomi yang menguasai hidup orang banyak, seperti Bulog dan Pertamina, serta berkembangnya praktek nepotisme, korupsi dan kolusi..

Berbagai fasilitas dan proteksi pemerintah serta berbagai instrumen peraturan yang menguntungkan pelaku ekonomi dalam negeri (lokal pribumi) telah membantu terciptanya kelas pengusaha karbitan yang tumbuh atas dasar sistem *clientele* atau patron-klien yang memiliki kekuatan dalam kekuatan dalam ikut menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional.

### ***Deskripsi Sistem Ekonomi Islam***

Terpuruknya perekonomian nasional akibat krisis memang disebabkan banyak faktor, diantaranya adalah kuatnya intervensi negara atau dalam sistem politik yang tidak demokratis, telah menghasilkan "kegagalan pemerintah" atau *government failure* (Saidi, 1998:171) dalam bentuk praktik KKN, disamping papola kebijakan ekonomi yang cenderung kapitalistik yang menyebabkan fondamen perekonomian nasional menjadi keropos. Sistem politik korporatis yang diterapkan pemerintah orde baru telah menyuburkan praktik ekonomi yang klientelistik, tidak transparan dan manipulatif. Sehingga yang dibutuhkan saat ini adalah memeriksa kembali asumsi dasar perekonomian yang selama ini kita percayai dan

mencoba memikirkan ulang tentang sistem ekonomi alternatif yang lebih mengutamakan pemerataan kue pembangunan secara lebih demokratis, jujur dan transparan. Karena bagaimanapun juga yang menduduki ranking tertinggi korban krisis ini adalah rakyat Indonesia yang mayoritas beragama Islam (muslim).

Sistem Ekonomi Islam seperti yang dimaksud oleh Prawiranegara (tt: 10-15) adalah sistem ekonomi yang terjadi setelah prinsip ekonomi yang menjadi pedoman kerjanya dipengaruhi atau dibatasi oleh ajaran-ajaran Islam. Sistem ekonomi Islam tersebut bersumber dari Al Qur'an dan hadist yang dikembangkan oleh pemikiran manusia yang memenuhi syarat untuk ijtihad, dan kemudian diterapkan dalam masyarakat (Ali, 1988: 20). Sementara definisi ekonomi Islam lain dikemukakan oleh Muhammad Abdullah Al-Arabi (dalam Ahmadi dan Sitanggal, 1980:11) menerangkan bahwa ekonomi Islam terdiri dari dua bagian: salah satu diantaranya tetap, sedangkan yang lain dapat berubah-ubah. *Pertama* adalah yang diistilahkan dengan "sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al Qur'an dan As Sunnah", yang ada hubungannya dengan urusan-urusan ekonomi. *Kedua* diistilahkan dengan "bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa". Bertolak dari hal tersebut, maka sistem ekonomi Islam haruslah tersusun dari seperangkat nilai yang dapat membangun organisasi kegiatan ekonomi menurut kerangka referensi tertentu, yakni filsafat ekonomi Islam, nilai dasar ekonomi Islam dan nilai instrumental ekonomi Islam (A.M. Saefuddin, et. al., 1998:34). Satu hal yang membedakan ciri konsep ekonomi Islam dengan konsep ekonomi lainnya di dunia, konsep ekonomi kapitalis dan konsep ekonomi marxis adalah pada konsep *triangle*, yakni Tuhan-Manusia-Alam.

Pada dasarnya strategi sistem ekonomi Indonesia pasca kemerdekaan cenderung menggunakan model atau sistem ekonomi neo-keynesian (Saidi, 1998: 74). Dimana penekanan terletak pada pentingnya pertumbuhan ekonomi dengan sebuah "dorongan kuat" dan direncanakan secara tersentralisasi melalui mekanisme pasar (liberal). Akibat terlalu kuatnya "dorongan eksternal" menjadikan Indonesia menjadi kelompok negara pengutang terbesar di dunia. Sehingga dari kebijakan yang kapitalistik tersebut menyebabkan Indonesia terjebak serta menjadi korban dari sistem kapitalisme internasional itu sendiri (Mubyarto, 1999: 2-3). Bercermin dari hal diatas, bila digabungkan dengan nilai dasar ekonomi Islam tampak ada suatu hubungan yang bersifat antagonistik. Bahwa Islam menekankan pada nilai kepemilikan (*ownership*) atas harta kekayaan dan sumber-sumber ekonomi, khususnya yang menguasai hajat hidup orang banyak secara terbatas, bersendikan atas nilai keadilan (*justice*) dan nilai keseimbangan (*equilibrium*) yang terimplementasikan ke dalam nilai instrumental ekonomi Islam, yakni jaminan sosial melalui konsepsi zakat, sistem bagi hasil (non riba), *al-musyarakah* (kerjasama/ cooperation), dan hisbah (lembaga pengawasan oleh negara).

**Tabel 4.1**  
**Perbandingan Ekonomi Islam dengan aliran Kapitalis dan Marxis**

Segi Perbandingan	Konsep Islam	Konsep Kapitalis	Konsep Marxis
<b>Filsafat Ekonomi</b>	Berasal konsep tauhid yang menguatkan Tuhan sebagai puncak dari segala hukum kausalitas	berasas laissez faire yang memberi kebebasan penuh kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan materialistiknya	berasas pada konsep perjuangan kelas yang menegaskan peran Tuha sebagai kausa prima kehidupan
<b>Nilai Dasar Ekonomi</b>	Kebebasan terbatas terhadap pemilikan (ownership) harta kekayaan dan sumber-sumber ekonomi, Nilai keseimbangan ( <i>equilibrium</i> ), Nilai Keadilan ( <i>justice</i> ).	hak milik individu adalah absolut, adanya kebebasan memasuki semua sektor kegiatan ekonomi dan transaksi menurut persaingan bebas dan norma individu ditarik dari individualisme dan utilitarianisme.	Hak milik ada pada kaum proletar yang diwakili oleh pemerintah diktator, sentralistik dan mematikan kreativitas ekonomi rakyat, pendapatan dan distribusi kolektif adalah hal utama dan hubungan ekonomi di luar negara sangat dibatasi.
<b>Nilai Instrumen Ekonomi</b>	Konsep zakat larangan riba (bunga) kerjasama ekonomi ( <i>cooperation</i> atau <i>syirkah</i> ), jaminan Sosial, Peran negara (lembaga pengawasan atau <i>hisbah</i> )	Terletak pada persaingan sempurna dan kebebasan keluar masuk tanpa restriksi, Pasar yang monopolistik, Informasi dan bentuk pasar atomistik dari tiap unit ekonomi	Perencanaan sentralistik melalui proses iterasi yang mekanistik, Pemilikan kaum proletar thd. faktor produksi secara kolektif

Sumber : A. M. Saefuddin, et.al (1998: 35-56)

### 1. *Konsepsi Zakat*

Zakat adalah kewajiban berdasarkan syariat. Islam mewajibkannya atas setiap muslim yang sampai pada nisab zakat (Ahmadi dan Sitanggal, 1980:110). Nisab adalah batas minimal dari harta mulai wajib dikeluarkan dari padanya. Sebenarnya zakat memainkan peranan penting dan signifikan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, dan berpengaruh nyata pada yingkah laku konsumsi. Menurut A.M Saefudin (dalam Sasono et al, 1998: 46), pengaruh zakat terhadap aspek sosial ekonomi adalah memberikan dampak terciptanya keamanan masyarakat dan menghilangkan pertentangan kelas karena ketajaman perbedaan pendapatan. Selain itu, pelaksanaan zakat oleh negara akan menunjang terbentuknya keadaan ekonomi yang stabil, yakni peningkatan produktifitas yang dibarengi dengan pemerataan pendapatan serta peningkatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Zakat merupakan satu bentuk jaminan sosial seperti yang dikatakan oleh Todaro (1995) yang dimbilkan dari pendapatan golongan atas secara proporsional (melalui mekanisme nisbah zakat) lewat kebijakan penarikan pajak progresif atas kekayaan dan pendapatan.

## 2. Sistem bagi hasil

Banyak pakar ekonomi yang berkeyakinan bahwa krisis ekonomi dewasa ini disebabkan oleh sistem riba (bunga), padahal Islam secara jelas melarang adanya praktek riba atau pembungaan uang. Karena hakikatnya adalah suatu penolakan terhadap resiko finansial tambahan yang ditetapkan dalam transaksi uang atau modal maupun jual beli yang dibebankan pada satu pihak saja, sedangkan pihak lainnya dijamin keuntungannya (A.M saefudin, et al., 1998: 47). Yang termasuk dalam praktek riba adalah bunag pinjaman uang, modal, dan barang dalam segala bentuk dan macamnya, baik untuk tujuan produktif dan konsumtif, dengan tingkat bunga tinggi atau rendah, dan dalam jangka waktu panjang maupun pendek.

Maka sistem bunga yang cenderung tidak adil dan bersifat pemerasan tersebut harus diganti dengan sistem yang mutualistik, yakni konsep sistem bagi hasil. Prinsip ini pada dasarnya adalah penentuan proporsi berbagi keuntungan pada saat akad (perjanjian) dilakukan yang pelaksanaannya terjadi pada saat untung itu telah ada dan telah kelihatan menurut proporsi yang telah disepakati (PINBUK, tt: 15-16).

**Tabel 4.2**  
**Perbandingan antara Sistem Bunga dan Sistem Bagi Hasil**

	<b>Sistem Bunga</b>	<b>Sistem Bagi Hasil</b>
1.	Penentuan besarnya hasil (bunga) dibuat sebelumnya (pada waktu akad) tanpa berpedoman pada untung rugi.	Penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi (besarnya jumlah diketahui sesudah berusaha, sesudah ada ungunya).
2.	Besarnya presentase (bunga/nilai rupiah) ditentukan sebelumnya, berdasarkan jumlah uang yang dipinjam	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan keuntungan yang paralel dengan menyepakati proposi pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak, belum tentu besarnya.
3.	Jika terjadi kerugian ditanggung si peminjam saja berdasarkan pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan.	Jika terjadi kerugian ditanggung kedua belah pihak yaitu pemilik modal dan si peminjam.
4.	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun keuntungan meningkat.	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
5.	Besarnya bunga yang harus dibayar si peminjam pasti diterima baik	Keberhasilan usaha yang jadi perhatian bersama yaitu si peminjam dan si pemilik modal.

Sumber : PINBUK PUSAT

### **3. *Al-Musyarakah***

Adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu usaha yang keuntungannya dibagi sesuai dengan persetujuan antara kedua belah pihak dan tidak harus sama dengan pangsa modal masing-masing dan jika mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan pangsa modal masing-masing (Sumitro, 1996: 34-35). Menurut Fiqh ada dua bentuk musyarakah, yaitu syarikah *Amlak* (secara otomatis) dan syarikah *Uqud* (atas dasar kontrak). Musyarakah Uqud dibagi dalam lima jenis akad, yaitu: 1) Syirkah 'Inan, 2) Syirkah Mudlarabah, 3) Syirkah Wujuh, 4) Syirkah Abdan, 5) Syirkah Mufawadah.

### **4. *Hisbah***

Hisbah merupakan bentuk peran atau campur tangan pemerintah atau negara dalam fungsionalisasi ekonomi Islam, sebagai pemilik manfaat sumber-sumber, produsen, distributor dan sekaligus sebagai lembaga pengawasan kehidupan ekonomi. Menurut A.M Saefudin (1998: 56), hisbah adalah institusi negara yang pernah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. sebagai lembaga pengawas pasar ekonomi yang menjamin tidak adanya perkosaan dan pelanggaran aturan moral dalam pasar monopoli, perlindungan atas hak konsumen, keamanan dan kesehatan kehidupan ekonomi. Lembaga ini bersifat independen dari kekuasaan yudisial maupun eksekutif. Peran negara dalam lembaga pengawasan ini diperlukan dalam instrumentasi dan fungsionalisasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam aspek legal, perencanaan dan pengawasan dalam pengalokasian/distribusi sumber-sumber maupun dana, pemertaan pendapatan dan kekayaan serta pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.

### ***Faktor Pendukung***

Sistem ekonomi Islam dengan derivasi sistemnya menjanjikan suatu bentuk perekonomian yang jujur, transparan, egaliter dan demokratis. Nilai keadilan dan keseimbangan menjadi dasar dari perilaku ekonomi Islam. Keterbukaan dari sistem ini membuat kehidupan perekonomian menjadi jujur dan non KKN (sesuatu hal yang ditakuti pada jaman Orba), non monopoli dan jaminan atas hak-hak konsumen.

Kelebihan sistem ini selain di atas adalah mudah diterima karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, dan sebagian besar masyarakat masih bergerak dalam sektor tradisional. Aspek keadilan membuat distribusi pendapatan menjadi lebih merata secara proporsional. Seperti yang disinggung oleh Garry Field, pada tipologi pembangunan pertumbuhan yang ketiga, bahwa distribusi pendapatan akan lebih adil dan merata apabila terjadi perluasan dan pembesaran ekonomi sektor tradisional. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk dapat lebih berperan dalam menentukan arah perekonomian nasional.

Meski tidak berarti menurunkan tingkat pertumbuhan namun untuk masa yang lebih dekat, mengurangi angka kemiskinan yang semakin besar akibat krisis adalah hal yang urgen, sehingga kebijakan ini bisa menjadi pilihan yang utama.

Namun faktor pendukung yang paling utama dalam melakukan reformasi ekonomi ini adalah adanya kemauan kuat (*political will*) dari pemerintah dalam melaksanakannya. Nelson (1990) (dalam Saidi, 1998: 36) menyebutkan bahwa salah satu variabel yang dijadikan pertimbangan terhadap pelaksanaan reformasi adalah pola kepemimpinan. Kemauan politik dan kepemimpinan dianggap penting untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan program reformasi.

### ***Strategi Pelaksanaan***

Hipotesa Nelson menyebutkan bahwa semakin parah tingkat krisis suatu ekonomi maka semakin besar kemungkinan dilaksanakannya program reformasi yang berskala luas. Dengan melihat kondisi krisis ekonomi Indonesia yang sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda segera pulih memberi kesimpulan bahwa reformasi ekonomi secara radikal dan berskala luas memang dibutuhkan. Besarnya tanggungan hutang luar negeri beserta bunganya, sebesar US\$ 137, 42 milyar (terdiri atas US\$ 63, 46 milyar hutang pemerintah, dan US\$ 73, 96 milyar hutang swasta) (lihat Abadi, Desember 1998: 10) memberikan implikasi yang sangat berat bagi bangkitnya perekonomian tanah air, belum lagi tambahan pinjaman IMF sebesar US\$ 43 milyar hasil *Letter of Intent* untuk program pemulihan ekonomi. Melaksanakan semua resep IMF-plus yang tertuang dalam *Letter of Intent* adalah suatu keniscayaan yang mesti dituruti, meskipun kita harus mencoba membuat resep sendiri yang sesuai dengan kondisi sosio-kultural ekonomi masyarakat Indonesia.

Strategi yang mungkin bisa diterapkan adalah secara bertingkat atau berjenjang. Maksudnya dalam jangka pendek, menciptakan peluang-peluang kerja baru ditengah krisis dalam rangka mengurangi kemiskinan akibat pengangguran adalah hal mendesak. Sektor informal dan usaha kecil menjadi pilihan utama dalam membuka peluang baru, karena sektor inilah yang terbukti paling kuat dalam menghadapi guncangan ekonomi akibat krisis. Penggunaan pinjaman dari IMF-plus harus dilakukan secara hati-hati dan tepat sasaran agar efektifitas penggunaan dana dapat tercapai dan benar-benar untuk sektor informal dan usaha kecil.

Langkah selanjutnya adalah secara perlahan merubah dan merekonstruksi paradigma perbankan konvensional dan sistem bunganya dengan perbankan syariah yang menggunakan sistem bagi hasil. Selain itu harus diberlakukan sistem perngakta hukum yang kuat dan pengawasan perbankan yang ketat. Segala program rehabilitasi dan stabilisasi hasil ramuan IMF, meskipun terasa pahit harus dilaksanakan sampai keadaan perekonomian

menunjukkan tren kestabilan, yang ditandai dengan naiknya tingkat pertumbuhan ke arah positif. Hasil analisis CSIS (lihat Kompas, Maret 1999: 1) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi diperkirakan baru mencapai titik terendah (2, 0%) mulai awal tahun 2000, dan selanjutnya meningkat menjadi 4,0% pada tahun 2001; 5,0% pada tahun 2002; 6,0% pada tahun 2003; dan baru 7,0% pada tahun 2004. Perkiraan ini merupakan perkiraan ekonomi yang sangat optimis karena masih harus melewati variabel penentu lain berupa Pemilu Juni 1999.

Proses Pemilu 1999 merupakan prasyarat utama bagi stabilitas politik nasional yang selanjutnya membawa pengaruh dan implikasi mendasar bagi pulihnya perekonomian nasional. Karena dari Pemilu yang adil dan jujur akan dihasilkan struktur pemerintahan yang terlegitimasi oleh rakyat. Seperti yang dikatakatan oleh Nelson, bahwa variabel lain yang menentukan kesuksesan pelaksanaan reformasi adalah struktur dan susunan elit politik, yang bertautan erat dengan jenis rejim dan karakteristik khususnya. Disinilah letak kesungguhan *political will* pemerintah diuji, apakah proses reformasi itu dilaksanakan secara koheren atau sepotong-potong.

Dalam kondisi perekonomian yang stabil, sistem ekonomi Islam sangat mungkin untuk diterapkan karena pemerataan distribusi pendapatan dianggap lebih menjanjikan daripada sistem kapitalis dan sosialis. Sehingga untuk jangka panjang, dengan asumsi Pemilu 1999 sukses dan ada *political will* dari pemerintah untuk mempertimbangkan sistem ekonomi Islam, maka sistem ini menjanjikan kehidupan perekonomian yang jujur, adil dan merata sesuai dengan amanah pasal 33 UUD 1945. Sistem ekonomi Islam mengandung nilai-nilai; bekerja menurut aksioma dasar dan instrumental dalam mengelola ekonomi berdasar Qur'an dan Hadist; bersifat dinamis menurut dimensi ruang dan waktu, karena Islam adalah *rahmatan lil alamin* (untuk seluruh alam, bukan hanya umat Islam).

## V. Kesimpulan Dan Saran

### ***Kesimpulan***

Dari penjelasan dan pembahasan diatas maka dapat ditarik beberapa macam kesimpulan sebagai berikut:

1. Selama masa pemerintahan Orde Baru menganut dua macam pola sistem kebijakan ekonomi yakni kebijakan ekonomi liberalistik pada fase stabilisasi perekonomian awal Orde Baru dan kebijakan ekonomi nasionalistik-protektif pada fase pasca boom minyak.
2. Kebijakan sistem ekonomi yang dijalankan pemerintah Orde Baru telah mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa bagi peningkatan perekonomian nasional. Namun disisi lain, pemilihan kebijakan ekonomi yang bersifat elitis, liberal (kapitalistik) serta lamanya rejim Orde Baru yang otoritarian mengakibatkan rapuhnya

fundamen perekonomian nasional, tersumbatnya kreatifitas ekonomi rakyat karena kebijakan monopoli dan semakin besarnya defisit neraca berjalan.

3. Sistem ekonomi Islam sebagai sistem ekonomi alternatif merupakan konsepsi sistem pembangunan ekonomi jangka panjang yang penekanannya pada pelibatan rakyat secara penuh dengan pengawasan pemerintah dalam mengembangkan kreatifitas potensi ekonominya sebagai cara untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap kekuatan ekonomi nasional. Pemerataan distribusi pendapatan secara terbuka, egaliter, adil dan demokratis dengan tetap mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan sasaran dari sistem ekonomi ini.
4. Nilai dasar dari sistem ekonomi Islam adalah hak kepemilikan yang terbatas pada sumber-sumber ekonomi, nilai keadilan dan nilai keseimbangan. Sedang nilai instrumentalnya adalah zakat, sistem bagi hasil (non bunga), jaminan sosial, koperasi atau al-musyarakah dan adanya lembaga pengawasan atau hisbah dari pemerintah.
5. Faktor-faktor pendukung terlaksananya reformasi ekonomi menuju sistem ekonomi Islam adalah masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, konsentrasi ekonomi rakyat sebagian besar masih pada sektor tradisional, serta adanya kemauan (*political will*) yang kuat dan sungguh-sungguh dari pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan masyarakat sebagai pendukung reformasi kebijakan pemerintah dalam memperjuangkan pelaksanaan ekonomi Islam.

### ***Saran-saran***

1. Perlunya memikirkan kembali konsep sistem ekonomi yang selama ini dijalankan guna memperkokoh fundamental perekonomian nasional.
2. Diperlukan seperangkat kebijakan pemerintah yang mendukung, baik di bidang ekonomi maupun hukum terhadap sistem ekonomi Islam.
3. Perlu adanya semacam lembaga khusus yang secara *concern* melakukan pengkajian, penelitian dan pengembangan secara komprehensif tentang sistem ekonomi Islam.

### **Daftar Pustaka**

- Al-'Assal, A.M. dan Fathi Ahmad A.K. 1980. *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-Prinsip dan Tujuan-Tujuannya*. Terjemahan Abu Ahmadi dan Anshori Umar Sitanggal dari *An-Nidzaamul Iqtishaadi Fil Islam Mabaadi* - Uhu Wahdaafuhu (Tanpa Tahun). Surabaya: Bina Ilmu
- Anonim. 1993. *Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN)*
- Anonim. 1992. *Biro Pusat Statistik*

- Anonim. 1994. *Biro Pusat Statistik*
- Basri, Faisal H. 1995. *Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI: Distorsi, Peluang dan Kendala*. Jakarta: Erlangga
- Bulan Bintang Abadi. 17-23 Desember 1998. Hal. 10
- Daud Ali, Muhammad. 1988. *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Kuncoro, Mudrajad. 1996. "Nasionalisme Ekonomi dan Tantangannya Dalam Era Globalisasi". Makalah disampaikan dalam Pekan Ilmiah Mahasiswa I Dies Natalis XXXII Universitas Jember, 11-12 Nopember.
- Kompas. Sabtu, 6 maret 1999, hal. 1
- Mubyarto. 1987. *Ekonomi Pancasila, Gagasan dan Kemungkinannya*. Jakarta: LP3ES.
- Mubyarto. 1999. "Ekonomi Indonesia Korban Kapitalisme". Dalam Buletin PIMNAS XII. Edisi 2/26 Februari. Jakarta: 2-3.
- Nazir, M. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prayitno, H. dan Budi Santosa. 1996. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prisma. 1994. Jakarta: LP3ES.
- Raharjo, M. Dawam. 1989. *Perspektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam*. Bandung: Mizan.
- Saidi, Zaidi. 1998. *Soeharto Menjaring Matahari*. Bandung-Jakarta: Mizan bekerjasama dengan PIRAC.
- Saleh, Ismail. 1990. *Hukum dan Keadilan Ekonomi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sasono, Adi, Didin Hafidudin, A.M. Saefudin, dkk. 1998. *Solusi Islam Atas Problematika Umat (Ekonomi, Pendidikan dan Dakwah)*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Sumitro, Warkum. 1996. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*. Jakarta: Rajawali Press.
- Team PINBUK PUSAT. 1998. *Buku Pintar BMT Unit Simpan Pinjam dan Grosir*. Surabaya: Vde Press
- Tim Penyusun. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember.
- Todaro, Michael P. 1995. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Terjemahan Burhanudin Abdullah dan Haris Munandar dari *Economic Development in The Third World, Fourth Edition* (1989). Jakarta: Erlangga.

**Lampiran 1****NISAB ZAKAT**

No.	Jenis Zakat	Nisab
1.	Binatang ternak (unta, sapi, kambing)	satu tahun digembalakan
2.	Emas dan Perak	nisab emas = 77,56 gram nisab perak = 543 gram zakatnya : 2,5% atau 1/40
3.	Barang Dagangan	20 dirham emas = 77,56 gram emas zakatnya = 1/40
4.	Hasil bercocok tanam dan buah-buahan	1/10 hasil jika diairi tanpa alat 1/20 hasil jika diairi dengan alat

Cat: Pada dasarnya nisab atas kekayaan seseorang, baik fitrah maupun maal adalah sebesar 2,5% atau 1/40 bagiannya, kecuali zakat hewan ternak dan hasil pertanian.

**Lampiran 2****AL- MUSYARAKAH**

Jenis dan ciri Al-Musyarakah:

1. **Syirkah 'Inan**, cirinya:
  - Besarnya penyertaan modal dari masing-masing anggota harus sama.
  - Masing-masing anggota berhak penuh aktif dalam pengelolaan perusahaan.
  - Pembagian keuntungan (profit) dan kerugian bisa dilakukan menurut besarnya pangsa modal dan bisa berdasarkan persetujuan (kesepakatan).
2. **Syirkah Mufadhah**, cirinya:
  - Kesamaan penyertaan modal masing-masing anggota.
  - Setiap anggota harus aktif dalam pengelolaan usaha
  - Pembagian keuntungan maupun kerugian dibagi menurut pangsa modal masing-masing.
3. **Syirkah Wujuh**, cirinya:
  - Para anggota hanya mengandalkan wibawa dan nama baik mereka, tanpa menyertakan modal.
  - Pembagian keuntungan maupun kerugian ditentukan menurut persetujuan (kesepakatan)

4. ***Syirkah Abdan***, cirinya:

- Sekerja atau usahanya berkaitan
- Menerima pesanan dari pihak ketiga.
- Keuntungan dan kerugian dibagi menurut perjanjian.

5. ***Syirkah mudlarabah***, cirinya:

- Pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek atau usaha dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut.
- Pemilik modal tidak dibenarkan ikut dalam pengelolaan usaha, tetapi diperbolehkan membuat usulan dan melakukan pengawasan.
- Pembagian hasil keuntungan sesuai dengan perjanjian.
- Jika mengalami kerugian maka sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan oleh pengusaha.